

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi yang ada, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi menurut Santoso (2008) dalam cefrida dkk (2014).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan *control* terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah penerapan akuntansi publik, kualitas peraturan perundangan serta ketaatan pada peraturan perundanganitu sendiri, kualitas laporan keuangan (Pamungkas, 2012), standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan (Jannaini, 2013), kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan (Herawaty, 2011), kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi terjadinya ketaatan pada peraturan perundangan (Zirman dkk, 2010), dan banyak hal lainnya.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan akan diteliti kembali adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan dengan alasan sebagai berikut:

Variabel bebas pertama dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Suhartono dan Solichin (2006) dalam bpkad kab. Banjar (2017), Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Variabel bebas kedua dalam penelitian ini adalah pengendalian (*control*) akuntansi. Pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery, 2009).

Variabel bebas ketiga dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi sektor publik. Penerapan akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Bastian, 2006).

Variabel bebas keempat dalam penelitian ini adalah ketaatan pada peraturan perundangan. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional.

Variabel bebas kelima dalam penelitian ini adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini merupakan replikasi sekaligus pengembangan dari penelitian Cefrida, dkk (2014) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Dan hasil dari penelitian tersebut yaitu Pengujian pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan pada instansi pemerintah kota

Pekanbaru memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan Pengujian pengaruh variabel pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menambahkan variabel sistem pelaporan yang terdapat pada penelitian Herawaty (2011) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Selain itu penelitian ini juga menambahkan variabel ketaatan pada peraturan perundangan yang berpengaruh dalam Zirman, dkk (2010) meneliti bahwa Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini memperlihatkan variabel Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Fenomena yang terjadi berkenaan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung adalah diketahui, Dinsos Bandarlampung terkesan tertutup dan enggan menyerahkan data realisasi penerima bantuan dana hibah ponpes semenjak adanya pemberitaan yang menyebut bahwa bantuan tersebut diduga banyak penyimpang. Kadissos Akuan Effendi sempat membantah adanya dugaan penyelewengan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung untuk sejumlah Ponpes. Diketahui, dana hibah

untuk pondok pesantren (Ponpes) di Dinas Sosial Kota Bandarlampung sejak tahun 2011 hingga 2013, diduga bermasalah dan syarat penyimpangan.

Selain dugaan gratifikasi, program yang menelan dana hingga Rp 4 miliar rupiah itu juga ditengarai tidak tepat sasaran. Sejumlah ponpes yang tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) dan tidak memenuhi kualifikasi, justru mendapat kucuran dana. Sebaliknya, beberapa ponpes yang dinilai layak serta memenuhi persyaratan justru tak pernah tersentuh bantuan itu. (www.bandarlampungnews.com).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kembali bagaimana dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, PENERAPAN AKUNTANSI PUBLIK, KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan perundangan, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung?

2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung?
3. Apakah penerapan akuntansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung?
4. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung?
5. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris ssspengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh penerapan akuntansi publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung.

1. 5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang akanmelakukan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah dalam kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi publik, pengawasan fungsional dan ketaatan pada peraturan perundangan yang lebih baik dan efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bandar lampung.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam Lima bab secara terpisah yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

